

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 28 Januari 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.co.id	Jumat, 28 Januari 2022	Kementerian PUPR RI Selesaikan Pembangunan 96 Lokasi Jembatan Rusak dan Longsor Pascabencana NTT	<p>Kementerian PUPR menargetkan penanganan secara permanen infrastruktur konektivitas terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selesai Februari 2022. Banjir bandang akibat hujan deras di wilayah NTT pada April 2021 lalu menyebabkan sejumlah jembatan rusak dan tanah longsor pada ruas jalan nasional.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/393831/kementerian-pupr-ri-selesaikan-pembangunan-96-lokasi-jembatan-rusak-dan-longsor-pascabencana-ntt</p> <p>https://independensi.com/2022/01/27/ke-menterian-pupr-selesaikan-pembangunan-96-lokasi-jembatan-rusak-dan-longsor-pascabencana-ntt/</p> <p>https://www.industry.co.id/read/101415/kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-96-lokasi-jembatan-rusak-dan-longsor-pascabencana-ntt</p>
2	Independensi.com	Jumat, 28 Januari 2022	Ditandai Peletakan Batu Pertama, Revitalisasi Pasar Mardika Ambon Dimulai	<p>Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merevitalisasi Pasar Mardika guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Ambon. Dimulainya revitalisasi tersebut ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Kamis (27/1/2022) di Kota Ambon, Provinsi Maluku.</p> <p>https://independensi.com/2022/01/27/ditandai-peletakan-batu-pertama-revitalisasi-pasar-mardika-ambon-dimulai/</p> <p>https://www.industry.co.id/read/101426/ditandai-peletakan-batu-pertama-revitalisasi-pasar-mardika-ambon-dimulai</p> <p>https://www.medcom.id/properti/news-properti/Wb7X2gak-bakal-direvitalisasi-begini-desain-pasar-mardika-di-ambon</p>
3	Bisnis.com	Jumat, 28 Januari 2022	Lahan Terbatas, Pemerintah Akan Genjot Pembangunan Rusun	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hendak meningkatkan pembangunan rusun karena selain mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan juga dinilai sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220126/47/1493799/lahan-terbatas-pemerintah-akan-genjot-pembangunan-rusun</p>

				<p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/27/163000921/pemerintah-minta-pengelolaan-rusun-lebih-profesional-</p> <p>https://investor.id/business/280178/pupr-dorong-profesionalisme-dalam-pengelolaan-rusun</p> <p>https://www.beritasatu.com/ekonomi/883979/kementerian-pupr-dorong-profesionalisme-pengelolaan-rusun</p> <p>https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/tahun-ini-perumnas-optimis-dapat-menjangkau-pasar-lebih-luas</p> <p>https://www.medcom.id/properti/news-properti/8KyJ76rN-pemerintah-diminta-segera-revisi-aturan-rusun-di-indonesia</p>
--	--	--	--	--

Judul	Perumusan Regulasi Rusun Perlu Libatkan Stakeholders	Tanggal	28 Januari 2022
Media	Investor Daily, Halaman 11		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pemilik dan penghuni rumah susun (rusun) untuk mengelola bangunan vertikal tersebut dengan baik dan profesional. Pembangunan rusun saat ini perlu ditingkatkan karena selain mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan juga dinilai sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.		

PENGELOLAAN RUSUN DIMINTA LEBIH PROFESIONAL

Perumusan Regulasi Rusun Perlu Libatkan Stakeholders

JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) terpilih periode 2022–2025 Adjit Lauhatta berharap pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) kembali berdialog mencari solusi terhadap permasalahan pengelolaan rusun.

Oleh Imam Mudzakir dan Edo Rusyanto

“P3RSI akan terus mengkaji dan aktif memberikan solusi kepada pemerintah,” kata dia dalam keterangan pers, Kamis (27/1).

Pernyataan Adjit dilontarkan dalam diskusi interaktif *Reposisi PPPSRS Atas Perubahan dan Penyesuaian Regulasi Pengelolaan Rusun* yang merupakan rangkaian acara Musyawarah Nasional III P3RSI, Rabu (26/1) yang gelar secara daring.

Menurut dia, perlu ada revisi terkait regulasi pengelolaan rumah susun di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, tambahan, regulasi di bidang pengelolaan rumah susun banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Mulai dari level peraturan gubernur, peraturan menteri, hingga Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja, namun dalam implemtasinya terjadi banyak konflik kepentingan.

“Perubahan dan perbaikan regulasi ini tentunya berimplikasi pada kehidupan penghunian dan pengelolaan rumah susun Indonesia. Yang jelas sebagian pengurus PPPSRS harus melakukan banyak penyesuaian,” ujar Adjit.

Selain itu, perubahan dan perbaikan regulasi juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) karena adanya sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Hal ini pula lah yang menjadi tantangan kepengurusan PPPSRS saat ini.

Senada dengan Adjit, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida mengungkapkan, aturan pembentukan PPPSRS saat ini tidak semudah apa yang dibayangkan oleh masyarakat.

Ada beberapa permasalahan, yang

menurut Totok masih perlu didiskusikan, seperti proses pembentukan pengurus dan administrasi yang lebih rumit dibanding dengan regulasi sebelumnya.

“REI menginginkan adanya keterbukaan sehingga tidak ada dusta diantara pemilik/penghuni, PPPSRS, dan developer,” kata dia, dalam keterangan pers yang sama.

Dia menambahkan, ada banyak yang perlu didiskusikan di antaranya aturan *one name one vote*, masa transisi, dan pengertian pelaku pembangunan dalam memfasilitasi pembentukan PPPSRS. “Ini semua demi kebaikan penghuni rumah susun, pengelola, serta developer yang ada di Indonesia,” ujar Totok.

Dia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aturan-aturan pembentukan kepengurusan PPPSRS, karena itulah kunci dari kesinambungan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang ada di Indonesia.

Lebih Profesional

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pemilik dan penghuni rumah susun (rusun) untuk mengelola bangunan vertikal tersebut dengan baik dan profesional. Pembangunan rusun saat ini perlu ditingkatkan karena selain mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan juga dinilai sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Rusun menjadi solusi atas perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas. Kami harap pengelolaan Rusun di Indonesia semakin baik dan profesional,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke III Pengurus Per-



Investor Daily/David Gita Rosa

Investasi Milenial

Suasana apartemen di kawasan Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Apartemen menjadi salah satu opsi investasi yang menarik kaum milenial. Seiring dengan pulihnya perekonomian, apartemen harga ekonomis di bawah Rp 1 miliar dengan cicilan ringan menjadi incaran milenial.

himpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (P3RSI) secara daring di Jakarta, Rabu (26/1).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Totok Lusida, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengurus dan anggota P3RSI.

Iwan menerangkan, adanya Musyawarah Nasional (Munas) ke III P3RSI Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan dalam pembangunan rusun. Pahalanya, semakin padatnya penduduk akan berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.

“Kami juga berharap pengelolaan rusun harus dilakukan secara profes-

sional dan melibatkan tenaga-tenaga teknik terlatih dalam perawatan dan perbaikan semua komponen bangunan gedung sehingga bisa menjaga umur bangunan sesuai dengan perencanaannya,” terangnya.

Di tengah lahan perkotaan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, imbuhnya, maka pilihan untuk meningkatkan kepadatan penduduk dalam satu wilayah ke dalam bentuk hunian vertikal, baik *high rise* atau pun *low rise*, menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan *supply* perumahan layak terjangkau bagi masyarakat.